

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa kebangkitan kembali dari keterpurukan ekonomi di negara kita, maka pemerintah memulai pembangunan dan perbaikan disegala bidang. Perkembangan wilayah dan kota di Indonesia berlanjut seiring dengan majunya jaman. Namun dalam hal perkembangan dan pembangunannya ternyata tidak terlepas dari berbagai tantangan yaitu bagaimana mewujudkan pembangunan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur dan pemerataan pembangunan di pusat

dan daerah untuk menghindari ketidakpuasan masyarakat daerah serta agar terlaksananya program pemerintah daerah yang dikenal saat ini yaitu “Otonomi Daerah” dalam hal pemerataan pembangunan disegala bidang.

Pemerintah harus melewati tantangan tersebut di tengah krisis ekonomi yang belum usai dan ketidakpastian politik serta peristiwa-peristiwa alam yang mengguncang Negara Republik Indonesia yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah juga dituntut untuk lebih transparan dalam menjalankan tugasnya dan membersihkan diri serta para jajarannya dari unsure korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu masyarakat diajak untuk turut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan .

Agar arah pengembangan dan pembangunan wilayah dan kota dalam menuju masyarakat yang adil dan makmur harus melaksanakan dan mewujudkan pada 2 hal berikut, yaitu:

1. Pembangunan yang berkesinambungan.

Jika dilihat dari segi ekonomi, pelaksanaan pembangunan harus lebih efisien dan lebih produktif, dari bidang sosial pembangunan harus lebih memperhatikan pemerataan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari sisi ekologi pembangunan harus dapat lebih memperhatikan kelestarian dan keseimbangan ekologi sehingga lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan itu tidak semakin rusak.

2. Menuju Pemerintahan yang baik

Pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan akan lebih baik jika melibatkan *multiactor*. Artinya bukan hanya pemerintah saja

yang terlibat, tetapi juga turut melibatkan pihak swasta serta lapisan masyarakat.

Salah satu alternatif untuk menuju pembangunan yang berkesinambungan yaitu dengan mengikut sertakan atau memberdayakan setiap lapisan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur makro. Sedangkan untuk menuju pemerintahan yang baik, selain dengan mengikut sertakan serta melibatkan masyarakat, juga dengan memberdayakan pemerintah daerah setempat sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dari pembangunan agar program pemerintah dalam hal Otonomi dan putra daerah dapat terlaksana serta tercapai dengan baik. Untuk memperoleh penawaran usaha terutama dari pihak swasta yang paling baik, maka diperlukan tender untuk setiap konsultan proyek yang akan dilaksanakan atau dijalankan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui proses pelelangan/prosedur atau tata cara pelaksanaan lelang konsultan pada proyek-proyek pemerintah kepada para akademika calon sarjana teknik sipil, sehingga penelitian ini dapat berguna bagi siapa saja.

Tujuan yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan mengenai tahap – tahap pelaksanaan lelang/tender konsultan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan KEPPRES No. 80 Tahun 2003.

1.3 Pembatasan Masalah

Setiap proyek pemerintah pengawasannya diserahkan kepada pihak swasta yaitu perusahaan konsultan konstruksi. Pemerintah mengajukan penawaran atau mengajukan tender kepada para konsultan untuk pengawasan proyek pemerintah tersebut. Maka masalah prosedur pelaksanaan tender konsultan pada proyek-proyek pemerintah yang diserahkan pengerjaannya pada pihak swasta dari awal perencanaan sampai selesainya proyek sesuai dengan Keppres No.80 tahun 2003, diambil sebagai topik utama pada penulisan tugas akhir ini. Study kasus diambil pada proyek Pengembangan Pembangunan Gedung Asrama Pendidikan PPPG Teknologi Bandung Jl. Pesantren Km.2 Cibabatan, Cimahi.

1.4 Sistematika Pembahasan

Tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, dengan pokok bahasan setiap bab-nya sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab ini, akan dibahas tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan penulisan, pembatasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, akan menguraikan teori-teori yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan pelaksanaan tender konsultan pada proyek-proyek pemerintah, kriteria pelaksanaan proyek yang akan ditawarkan pada pihak-pihak swasta baik melalui pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung dan swakelola serta

hal lain yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan tender pada proyek pemerintah.

BAB 3 STUDI KASUS

Pada Bab ini membahas tentang prosedur pelaksanaan tender konsultan pada suatu proyek pemerintah, syarat-syarat tender yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

Pada Bab ini, akan dibahas tentang analisis tender konsultan pada proyek pemerintah dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan Keppres No.80 tahun 2003 dan yang terjadi di wilayah kota Bandung.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini, akan dibahas tentang kesimpulan dan saran dari penulisan tentang pelaksanaan tender konsultan pada proyek pemerintah.